

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, penulis akan memaparkan dan menjelaskan tentang teori-teori yang ditemukan dalam literatur untuk menjelaskan tentang permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Tinjauan literatur ini berfungsi sebagai landasan teori yang nantinya akan digunakan dalam proses analisis data.

#### **2.1 Perpustakaan Kelurahan sebagai Perpustakaan Umum**

##### **2.1.1 Perpustakaan Umum**

###### **2.1.1.1 Pengertian**

IFLA (*International Federation of Library Associations and Institutions*) memberikan batasan perpustakaan umum sebagai perpustakaan yang didirikan dan dibiayai oleh pemerintah daerah atau pusat, atau oleh beberapa organisasi yang diberi izin untuk mendirikan perpustakaan atas nama organisasi tersebut yang penggunaannya disediakan untuk siapa saja tanpa perlakuan diskriminasi.

Selanjutnya dalam buku *Pengantar Ilmu Perpustakaan*, perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh dana umum dengan tujuan untuk melayani umum (Sulistyo-Basuki, 1991). Kemudian dalam UNESCO Public Library Manifesto 1994 disebutkan bahwa perpustakaan umum merupakan pusat informasi lokal yang bertujuan agar semua jenis pengetahuan dan informasi mudah diakses dan digunakan oleh pemakai (IFLA, 1995).

Dengan kata lain, perpustakaan umum dapat diartikan sebagai perpustakaan yang ditujukan untuk masyarakat tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, agama, kepercayaan, ras, usia, pandangan politik, pekerjaan, pendidikan, dan perbedaan lainnya. Kebebasan yang diberikan kepada semua anggota masyarakat untuk memanfaatkan layanan yang disediakan, merupakan salah satu komitmen perpustakaan umum sebagai lembaga sebagai lembaga potensial berpartisipasi dalam mencerdaskan masyarakat serta memenuhi semua kebutuhan informasi masyarakat.

Pengelolaan perpustakaan umum menggunakan dana umum. Dana umum adalah dana yang berasal dari masyarakat. Biasanya dikumpulkan melalui pajak dan dikelola oleh pemerintah. Dana ini kemudian digunakan untuk mengelola

perpustakaan umum sehingga jasa yang diberikan perpustakaan umum pada hakikatnya bersifat cuma-cuma.

### 2.1.1.2 Tujuan

Perpustakaan umum didirikan dengan tujuan membantu masyarakat meningkatkan ketrampilan mengembangkan serta mengoptimalkan dirinya sehingga menjadi manusia yang cerdas dan mandiri yang diperoleh melalui bahan pustaka. Karena itu oleh pemerintah, perpustakaan umum tidak hanya didirikan di lingkungan perkotaan saja, akan tetapi juga disetiap daerah-daerah terpencil di pedesaan.

Perpustakaan umum sebagai salah satu unit yang berkonsentrasi di bidang pendidikan, dan literasi mempunyai tugas pokok memberikan layanan bahan pustaka dan informasi kepada masyarakat umum dan kedinasan serta mempunyai misi sesuai dengan Manifesto Perpustakaan Umum UNESCO (*United Nations Educational Scientific and Cultural Organization*) 1994 yaitu:

- (1) Menciptakan kebiasaan dan kegemaran membaca untuk anak-anak pada usia sedini mungkin
- (2) Menunjang kegiatan belajar masyarakat, baik yang bersifat formal maupun informal, dalam segala tingkatan
- (3) Memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk mengembangkan kreatifitasnya
- (4) Bertindak selaku agen kultural artinya perpustakaan umum merupakan pusat utama kehidupan budaya bagi masyarakat sekitarnya. Perpustakaan umum bertugas menumbuhkan apresiasi budaya masyarakat dengan cara menyelenggarakan pameran budaya, pemutaran film dan penyediaan informasi yang dapat meningkatkan keikutsertaan, kegemaran dan apresiasi masyarakat terhadap segala bentuk seni budaya
- (5) Mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan pemberantasan buta huruf untuk semua umur dan berinisiatif untuk mengadakan kegiatan serupa

Perpustakaan ada dari masyarakat dan untuk masyarakat. Perpustakaan tidak dapat berfungsi dengan baik tanpa adanya dukungan dari masyarakat. Segala

bentuk kegiatan harus selalu diarahkan pada kepentingan masyarakat (Sasmitamihardja, 1988). Perpustakaan umum memberikan layanan secara terbuka kepada masyarakat. Pengguna perpustakaan dari tingkat sekolah dasar sampai dengan pengguna dari masyarakat peneliti dan perguruan tinggi berusaha dilayani oleh perpustakaan umum. Pada intinya, anggota masyarakat manapun dan dari mana pun berhak menggunakan segala fasilitas yang disediakan oleh perpustakaan ini (Pawit, 1991).

### 2.1.1.3 Fungsi

Perpustakaan umum mempunyai fungsi sebagai berikut:

- (1) Fungsi edukatif, yaitu menyediakan bahan pendidikan.
- (2) Fungsi informatif, yaitu menyediakan dan menyebarluaskan informasi.
- (3) Fungsi rekreatif, yaitu menyediakan bahan-bahan yang bersifat hiburan.
- (4) Fungsi referensi, yaitu menyediakan petunjuk, pedoman, dan bahan rujukan bagi anggota masyarakat.
- (5) Fungsi preservatif dan konservatif, yaitu melestarikan bahan-bahan dan hasil budaya bangsa untuk dapat dimanfaatkan masyarakat.
- (6) Fungsi riset kualitatif dan kuantitatif, yaitu menyediakan layanan penelitian (Mudjito, 1992).

Pentingnya arti perpustakaan umum bagi para penggunanya secara umum akan ditunjukkan oleh fasilitas yang ditawarkan kepada para penggunanya. Hal ini akan dinilai dari tingkat pemenuhan kebutuhan. Kesuksesan suatu institusi dalam memberikan layanan tidak terlepas dari tiga hal berikut: adanya tujuan bagi suatu komunitas, administrasi yang baik agar dapat menentukan prioritas, dan semua itu harus dijalankan oleh orang yang memiliki kemampuan (Murrison, 1988). Pentingnya arti dan peranan perpustakaan umum di tengah masyarakat dalam pembinaan sumber daya manusia juga dijelaskan oleh Jean Key Gates bahwa perpustakaan di tengah masyarakat adalah otak/pikiran masyarakat (Nasution, 1993). Hal ini mengingat fungsi perpustakaan umum sebagai tempat menimba ilmu bagi masyarakat; tempat untuk membangun pribadi mereka menjadi pribadi yang berguna bagi dirinya sendiri dan masyarakat di sekitarnya. Selain itu menurut Benjamin Franklin perpustakaan umum bukan hanya sebagai lembaga

pendidikan, tetapi juga sebagai lembaga penyebar ilmu pengetahuan sampai seseorang dapat mencapai cita-citanya dan menjadi warga negara yang lebih baik. Perpustakaan umum yang dalam fungsinya memberikan layanan kepada semua orang secara demokratis, ekonomis, dan efisien merupakan lembaga pendidikan non formal dan kehadirannya sangat didambakan di tengah-tengah masyarakat (Nasution, 1993). Peranan perpustakaan umum dalam masyarakat adalah untuk mendukung dan melayani kebutuhan informasi masyarakat.

Perpustakaan umum merupakan tempat yang baik untuk belajar, khususnya belajar dengan mandiri, dan merupakan sarana belajar informal dan independen, yaitu belajar yang dapat kita atur sendiri (Allred, 1995). Perpustakaan umum merupakan tempat bagi orang yang tidak tahu keinginannya, melalui para stafnya, seseorang akan dibantu dalam menemukan keinginannya dan mewujudkannya. Allred memberikan julukan kepada perpustakaan umum sebagai 'jendela dunia, pembuka pintu ke arah penjelajahan informasi'. Peranan dasar perpustakaan umum dalam masyarakat adalah sebagai lembaga yang memberikan layanan berupa penyediaan beraneka ragam sumber informasi untuk kepentingan masyarakat dari semua lapisan. Karena umumnya segala aspek yang berkaitan dengan perpustakaan ini, ada sebagian orang menyebutnya dengan julukan universitas rakyat (Pawit, 1991).

#### **2.1.1.4 Pembinaan dan Pengembangan**

Pembinaan dan pengembangan Perpustakaan Umum didasarkan atas kerjasama antar Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat setempat:

- a. Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas pembinaan teknis pengelolaan perpustakaan, pendidikan tenaga, dan penyediaan koleksi pertama serta pertumbuhan koleksi dalam jangka waktu tertentu;
- b. Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyediaan tanah, gedung, perlengkapan, biaya operasional, dan pengelolaannya;
- c. Masyarakat setempat memberikan partisipasi dalam memelihara dan menggairahkan pemanfaatan Perpustakaan Umum.

### **2.1.1.5 Sasaran Pemakai**

Berdasarkan pengertian perpustakaan umum yang diberikan oleh IFLA dan tujuan perpustakaan umum menurut Unesco, terlihat bahwa masyarakat yang menjadi sasaran untuk memanfaatkan layanan perpustakaan umum adalah masyarakat tanpa ada perbedaan perlakuan, baik dari segi usia (anak-anak, remaja, dewasa muda, dewasa, lansia), perorangan atau kelompok, organisasi/kelembagaan, pekerjaan, tingkat pendidikan, kesehatan, kelengkapan tubuh, agama, dsb.

Namun demikian, masyarakat di sekitar perpustakaan umum berada harus mendapat perhatian utama dalam memanfaatkan layanan perpustakaan (Mudjito, 1992). Hal itu dimaksudkan untuk memudahkan perpustakaan umum itu sendiri dalam menentukan jenis layanan yang tepat bagi masyarakat, baik masyarakat yang sudah memanfaatkan layanan (pemakai) maupun yang belum memanfaatkan layanan (pemakai potensial).

Menurut Mudjito (1992), terdapat anggota masyarakat yang secara potensial diharapkan berkunjung secara teratur ke perpustakaan umum dan perlu dibina sesuai dengan kelompoknya masing-masing, yaitu: Kelompok Ilmiah Remaja (KIR), Kelompok Pengabdian Masyarakat (KPM), Kelompok Mahasiswa Universitas Terbuka (KMUT), Kelompok Wanita (KW), dan Kelompok Putus Sekolah (KPS).

### **2.1.1.6 Kelompok Perpustakaan Umum**

Sulistyo-Basuki (1991) mengelompokkan perpustakaan umum di Indonesia menjadi:

(1) Perpustakaan Wilayah, yaitu perpustakaan yang terdapat di ibukota propinsi.

Perpustakaan ini semula bernama Perpustakaan Negara. Setiap propinsi memiliki satu Perpustakaan Wilayah kecuali DKI Jakarta yang koleksi perpustakaan Wilayahnya telah dijadikan satu dengan koleksi Perpustakaan Nasional.

(2) Perpustakaan Provinsi

Perpustakaan Provinsi hanya terdapat di Sulawesi Utara pada tahun 1972.

- (3) Perpustakaan Umum Kotamadya, yaitu perpustakaan umum yang dikelola oleh kotamadya. Berfungsi sebagai pusat belajar, jasa rujukan bagi seluruh lapisan masyarakat.
- (4) Perpustakaan Umum Kabupaten, yaitu perpustakaan yang dikelola oleh kabupaten. Fungsinya sama dengan fungsi perpustakaan umum kotamadya.
- (5) Perpustakaan Umum Kecamatan, yaitu perpustakaan yang terdapat di kecamatan.
- (6) Perpustakaan Umum Desa/Kelurahan, yaitu perpustakaan yang terdapat di desa dan dikelola oleh swadaya masyarakat desa.

Sementara itu menurut Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Umum terbitan PNRI di Jakarta tahun 1992, tingkat-tingkat Perpustakaan Umum meliputi:

- a. Perpustakaan Umum tingkat Kabupaten/Kotamadya (Dati II)
- b. Perpustakaan Umum tingkat Kecamatan
- c. Perpustakaan Umum tingkat Desa/Kelurahan yang berada di desa-desa/kelurahan-kelurahan.
- d. Perpustakaan Masjid dan Gereja
- e. Perpustakaan Keliling
- f. Perpustakaan Umum Contoh

## **2.1.2 Perpustakaan Kelurahan**

### **2.1.2.1 Pemerintahan Kelurahan**

Desa/kelurahan merupakan salah satu subsistem dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintahan desa adalah bagian dari sistem pemerintahan negara, yang strukturnya terdiri atas desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, propinsi dan pemerintah pusat. Desa/kelurahan adalah penyelenggara pemerintahan pada jenjang yang paling rendah menurut strukturnya, terkecil ruang lingkup wilayahnya, dan terdepan posisinya.

Pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan itu, meskipun berada pada posisi yang sama, tetapi mempunyai perbedaan yang prinsipil. Perbedaan dimaksud antara lain (a) nama kepala pemerintahan sebuah desa disebut Kepala

Desa, sehingga pemerintahan desa bersifat daerah otonom. Artinya, seorang Kepala Desa dipilih oleh penduduk desa yang bersangkutan secara demokratis dan langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber); (b) gajinya berupa hak menggarap tanah (*bengkok*) dan memetik hasilnya, selama yang bersangkutan menjabat; (c) daerah hukum kekuasaan pemerintahan berada di pedesaan (kumpulan sejumlah dukuh). Di sisi lain, pemerintahan kelurahan memiliki ciri: (a) bersifat administratif dan bukan daerah otonom. Artinya, bahwa seorang kepala pemerintahan itu diangkat sebagai pegawai negeri sipil (PNS) oleh pejabat yang berwenang, dengan sebutan Lurah; (b) lurah digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; (c) wilayah hukum dan kekuasaannya berada di daerah perkotaan, yaitu kabupaten/kota dan kota-kota besar yang lain. (Sutarno NS, 2008)

#### **2.1.2.2 Sejarah Perpustakaan Kelurahan**

Sulistyo Basuki (1994) menjelaskan bahwa perpustakaan kelurahan sesungguhnya berawal dari perpustakaan Rukun Warga (RW) yang dalam perkembangannya selanjutnya mengalami berbagai kesulitan seperti kekurangan ruangan, perpindahan pengurus yang menyebabkan tidak adanya pengurus tetap yang mengawasi perpustakaan, tiadanya kesinambungan koleksi oleh Pemda DKI, serta anggaran yang tidak jelas. Akibatnya banyak perpustakaan RW ditutup, koleksinya diambil oleh lurah yang kemudian membentuk perpustakaan kelurahan. Di lingkungan Pemda DKI, istilah perpustakaan kelurahan dikenal dengan istilah perpustakaan masyarakat, (mulai dibentuk pada tahun 1976). Perpustakaan ini sepenuhnya dibina oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Hingga tahun 1978, diketahui terdapat berbagai perpustakaan masyarakat.

Mulai tahun 1980-an, istilah perpustakaan masyarakat diganti lagi menjadi perpustakaan kelurahan. Penataran dilakukan terhadap petugas perpustakaan kelurahan bahkan sampai terbentuk Ikatan Pustakawan Kelurahan se-DKI Jakarta. Ikatan ini tidak berumur panjang karena belum sempat menyelesaikan tugasnya, ikatan ini telah bubar.

### **2.1.2.3 Pengertian Perpustakaan Kelurahan**

Berdasarkan Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 82 Tahun 2004 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Perpustakaan Kelurahan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang dimaksud dengan Perpustakaan Kelurahan adalah perpustakaan yang berada di wilayah kelurahan propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

### **2.1.2.4 Dasar Hukum**

Sutarno (2008) menerangkan bahwa untuk membentuk perpustakaan desa/kelurahan yang kuat sebaiknya didasarkan pada landasan legal formal atau landasan hukum. Selain itu, untuk melaksanakan kegiatannya berdasarkan landasan operasional yang ditetapkan oleh pejabat yang bersangkutan.

Peraturan yang mengatur tentang perpustakaan kelurahan terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan Pasal 22 ayat 1 yang berbunyi “Perpustakaan umum diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, dan desa, serta dapat diselenggarakan oleh masyarakat”. Selain itu, terdapat pula Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 82 Tahun 2004 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Perpustakaan Kelurahan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Peraturan ini mengganti Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 234 Tahun 1995 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Perpustakaan Kelurahan di lingkungan pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang kini sudah tidak berlaku lagi.

### **2.1.2.5 Maksud dan Tujuan**

Berdasarkan dengan UU No 43 Tahun 2007 dan SK Gubernur DKI Jakarta No 82 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Perpustakaan Kelurahan., tiap-tiap kelurahan diwajibkan mengadakan perpustakaan dengan tujuan melaksanakan tugas sesuai perintah aturan dan sekaligus ikut mencerdaskan bangsa.



### 2.1.2.6 Status, Tugas, dan Fungsi

Menurut Sutarno (2008), unit kerja perpustakaan desa/kelurahan memiliki status/kedudukan sebagai organisasi berada dalam koordinasi kepala desa/lurah dengan status lembaga nonstruktural. Organisasi tersebut sebagai perangkat layanan umum desa/kelurahan yang bersangkutan. Berdasarkan Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Umum terbitan PNRI di Jakarta tahun 1992:

- a. Perpustakaan umum desa/kelurahan bertugas untuk menghimpun, mendayagunakan, membina dan memelihara secara permanen bahan-bahan pustaka untuk kepentingan masyarakat umum dan memberikan bimbingan penggunaannya, menyantuni unit-unit perpustakaan umum lainnya yang berada dalam yurisdiksi Pemerintah Desa.
- b. Perpustakaan umum desa/kelurahan mempunyai fungsi: memberikan kemungkinan seluas-luasnya kepada masyarakat umum untuk mendapatkan bahan-bahan pustaka dalam mempertinggi nilai-nilai spiritual, kultural, intelektual, ekonomis dan warisan budaya Bangsa Indonesia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 & Garis-Garis Besar Haluan Negara dalam menunjang Pembangunan Nasional.

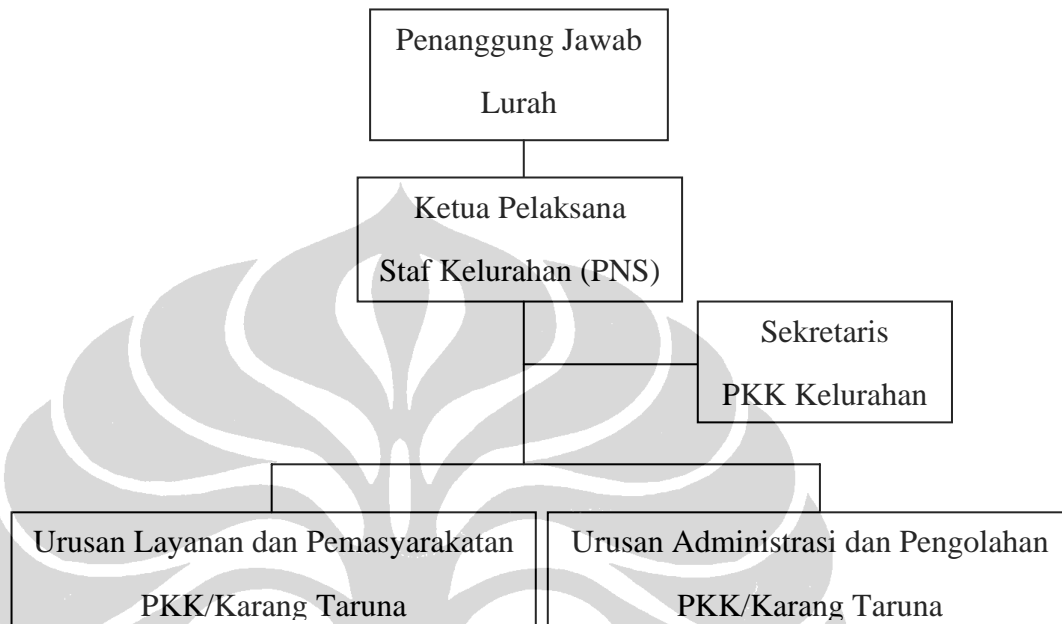
### 2.1.2.7 Struktur Organisasi Perpustakaan Kelurahan

Perihal penyelenggaraan perpustakaan kelurahan, sudah diatur dalam Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 82 Tahun 2004 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Perpustakaan Kelurahan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pasal 3-5 yaitu penyelenggaraan perpustakaan kelurahan dilakukan oleh Pengurus Perpustakaan dengan susunan sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab : Lurah
2. Ketua Pelaksana : Staf Kelurahan (PNS)
3. Sekretaris : PKK Kelurahan
4. Urusan-urusan :
  - a. Urusan Layanan dan pemasyarakatan: PKK/Karang Taruna
  - b. Urusan Administrasi dan Pengolahan: PKK/Karang Taruna

Penyelenggara tersebut di atas dibentuk menjadi Struktur Organisasi Perpustakaan Kelurahan seperti di bawah ini:

**Bagan 1. Struktur Organisasi Perpustakaan Kelurahan**



Para Pengurus Perpustakaan Kelurahan ini bertugas:

- (1) Mengefektifkan masyarakat kelurahan di bidang perpustakaan.
- (2) Mengembangkan perpustakaan kelurahan dengan swadaya masyarakat.
- (3) Menghimpun, mendayagunakan, dan memelihara bahan pustaka beserta perabot dan perlengkapan perpustakaan.
- (4) Mengolah bahan pustaka meliputi kegiatan katalogisasi, klasifikasi, pencatatan, dan berbagai jenis kegiatan perpustakaan lain.
- (5) Melayani masyarakat pengguna jasa perpustakaan.
- (6) Membuat laporan penyelenggaraan perpustakaan kelurahan secara periodik kepada walikotamadya/bupati melalui camat dan Kantor Perpustakaan Umum Kotamadya/Kabupaten.

Sementara itu, pelaksanaan kegiatan sehari-hari perpustakaan kelurahan dilakukan oleh pengelola perpustakaan yang ditentukan sekurang-kurangnya dua orang dengan pendidikan minimal tamatan SLTA sederajat dan telah mengikuti kursus teknis perpustakaan. Lurah secara fungsional sebagai penanggung jawab

dalam pelaksanaan pengelolaan perpustakaan kelurahan harus berkonsultasi dengan camat, Kepala Kantor Perpustakaan Umum Kotamadya, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kotamadya.

#### **2.1.2.8 Promosi**

Hal yang tak kalah penting dalam penyelenggaraan perpustakaan kelurahan adalah promosinya. Cara mempromosikan perpustakaan kelurahan juga turut diatur dalam Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 82 Tahun 2004 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Perpustakaan Kelurahan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pasal 9 ayat 2 bahwa promosi perpustakaan kelurahan dapat dilakukan melalui penyuluhan/penerangan pada masyarakat tentang keberadaan dan jasa layanan yang dapat diberikan oleh perpustakaan kelurahan. Selain itu, promosi juga dapat berupa penyampaian informasi mengenai keberadaan perpustakaan kelurahan serta manfaatnya kepada masyarakat pada acara/momen tertentu. Sayangnya pihak kelurahan seringkali kurang menyadari pentingnya promosi perpustakaan karena menganggap kegiatan ini dapat memakan anggaran keuangan kelurahan.

#### **2.1.2.9 Pembinaan**

Pembinaan perpustakaan kelurahan secara operasional dilakukan oleh Walikota dan secara teknis dilakukan oleh Kantor Perpustakaan Umum Kotamadya/Kabupaten Administratif. Dalam melakukan pembinaan perpustakaan kelurahan, perpustakaan umum kotamadya berkoordinasi dengan camat dan unit/instansi lain yang terkait. Peraturan mengenai pembinaan ini juga diatur dalam Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 82 Tahun 2004 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Perpustakaan Kelurahan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pasal 10 dan 11.

Banyak lembaga swasta yang ikut aktif dalam pembangunan masyarakat desa/kelurahan umumnya lebih mengarahkan ke pengembangan swadaya masyarakatnya serta penerapan teknologi tepat guna, namun belum ada yang menyentuh pembinaan perpustakaan desa/kelurahan. (Sulistyo-Basuki, 1994)

### 2.1.2.10 Pembiayaan

Masih menurut Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 82 Tahun 2004 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Perpustakaan Kelurahan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pasal 12, sumber pembiayaan penyelenggaraan Perpustakaan Kelurahan diperoleh dari Anggaran Pemerintah dan Pengeluaran Keuangan Kelurahan (APPKK), dan bantuan dari kantor Perpustakaan Umum Daerah propinsi DKI Jakarta dan Kantor Perpustakaan Umum Kotamadya/Kabupaten. Perpustakaan kelurahan juga diperbolehkan menerima sumbangan dana dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat atau berupa buku-buku maupun perlengkapan teknis perpustakaan lainnya.

Menurut Sulistyio Basuki (1994), sebenarnya perpustakaan desa/kelurahan memiliki banyak sumber pengadaan buku tergantung kepada bagaimana koordinasi setiap instansi serta kelincahan petugas perpustakaan desa. Di beberapa propinsi, seperti Jawa Timur, Badan Pembina Perpustakaan Jawa Timur memberikan bantuan sarana perpustakaan kepada daerah tingkat II. Hal ini dimungkinkan karena dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersedia dana untuk perpustakaan desa/kelurahan, termasuk biaya penataran petugas perpustakaan.

Pada beberapa kasus, pendirian perpustakaan desa/kelurahan biasanya dirintis oleh mahasiswa peserta KKN. Namun, biasanya se usai tugas mereka, perpustakaan desa/kelurahan akan menghadapi masalah seperti pengelolaan, terutama kekurangan buku. Mahasiswa peserta KKN pada umumnya akan menulis masalah tersebut di berbagai surat kabar dan mengharapkan bantuan untuk perpustakaan desa/kelurahan. Tugas pustakawanlah untuk meyakinkan merekayang ber-KKN bahwa pembinaan perpustakaan desa/kelurahan harus dilanjutkan dengan cara menggali dana untuk pengadaan buku selanjutnya. Usaha yang dimulai setengah-setengah, bila tugas KKN selesai, perpustakaan desa/kelurahan ditinggalkan tanpa pemikiran pengadaan dana lebih lanjut, dan pada jangka panjang akan mematikan minat baca penduduk desa/kelurahan serta mengakibatkan citra yang kurang baik mengenai perpustakaan di antara penduduk desa/kelurahan. Pembentukan perpustakaan desa/kelurahan perlu diikuti dengan

cara memperoleh dana, jika tidak perpustakaan akan merana dan akan ditinggalkan pemakainya.

## **2.2 Keberlangsungan Suatu Perpustakaan**

### **2.2.1 Keberlangsungan Perpustakaan Umum**

Keberadaan perpustakaan tidak lepas dari pandangan dan tanggapan masyarakat terhadapnya. Baik buruknya tanggapan dan pandangan tersebut, semuanya tergantung dari kinerja perpustakaan itu sendiri kepada masyarakat. Status dan kedudukan perpustakaan di dalam suatu organisasi merupakan suatu hal yang penting. Sebab hal itu akan ikut menentukan kinerja dan wibawa perpustakaan (Sutarno, 2008). Oleh karena itu, penting bagi perpustakaan untuk selalu mengikuti dan mencari tahu bagaimana tanggapan masyarakat untuk meningkatkan dan mengembangkan perpustakaan tersebut. Pertanyaannya sekarang adalah sejauh mana gaung, gema dan citra perpustakaan umum sekarang ini dipersepsikan oleh berbagai kalangan masyarakat (Muchyidin, 1998). Apabila mengacu pada Sutarno (2008), ciri-ciri atau tanda bahwa perpustakaan bermanfaat antara lain: banyak aktivitas yang dilaksanakan di perpustakaan, ramai pengunjung dan tamu, banyak pembaca, dan banyak transaksi informasi. Sementara itu, menurut Sabirin Nasution (1993), kurangnya reputasi perpustakaan di tengah masyarakat terutama disebabkan kondisi perpustakaan yang sangat memprihatinkan pada aspek-aspek berikut yaitu:

#### **1. Lokasi yang kurang strategis**

Lingkungan yang baik ikut memberikan andil dalam penyelenggaraan perpustakaan. Lingkungan tersebut antara lain lokasi yang strategis, mudah dikenal dan dijangkau masyarakat, bebas banjir, bersih, tenang, sehat, dan terdapat akses kendaraan. Lingkungan yang demikian merupakan salah satu faktor yang berpengaruh positif kepada perpustakaan, sehingga langsung atau tidak, merupakan kekuatan pendukung.

Djoko Kirmanto (2000) memang pernah mengungkapkan bahwa perpustakaan yang berada di tengah-tengah pemukiman seharusnya menempati lokasi yang strategis dan terintegrasi dengan bangunan layanan umum primer lain, sehingga dapat dijangkau bersama kepentingan lainnya.

2. Gedung dan ruangan yang belum memenuhi persyaratan.
3. Perlengkapan perpustakaan yang sangat minim dan tidak menarik.
4. Keadaan koleksi yang sangat lemah, baru mengandalkan buku hadiah atau sumbangan.
5. Kondisi ketenagaan yang lemah, belum berkualitas dan terampil.
6. Sistem pengelolaan yang semrawut.
7. Dana penunjang yang sangat lemah.

Chowdhury (2008) menjelaskan dalam bukunya yang berjudul *Librarianship: an introduction* bahwa perpustakaan umum merupakan sebuah hasil dari pemikiran para dermawan pada abad 19, penyaluran dana pada fasilitas umum untuk meningkatkan kesejahteraan individu maupun komunitas tempat mereka tinggal. Tujuan utama mereka ialah untuk memberikan akses seluas-luasnya terhadap bahan bacaan bagi masyarakat yang baru mengenal informasi, karena orang mampu sudah memiliki perpustakaan dan koleksi pribadi. Tujuan perpustakaan umum ini juga berpotensi menjadi awal kegagalan. Perpustakaan menjadi bergantung kepada bantuan pemerintah atau sumbangan pihak-pihak yang dermawan. Di sisi lain, perpustakaan umum mengandalkan kehadiran orang-orang yang melek informasi memiliki waktu luang untuk membaca di sana. Di negara-negara berkembang, dua karakteristik ini tidak ada. Kemakmuran masih menjadi konsentrasi utama sehingga kedermawanan menjadi langka.

8. Sistem layanan perpustakaan umum yang jauh ketinggalan dibandingkan perkembangan media komunikasi yang semakin canggih dengan peralatan elektroniknya.
9. Masih enggannya masyarakat mempergunakan jasa perpustakaan karena kurang pengetahuan.

Perpustakaan dan masyarakat secara teoritis semestinya memiliki hubungan yang erat karena di antara keduanya saling membutuhkan dan saling melengkapi. Maksudnya bahwa keberadaan perpustakaan adalah dalam rangka menyediakan informasi dan memenuhi kebutuhan pemakainya. Akan tetapi, pada kenyataannya, antara keduanya seolah-olah berjalan sendiri-sendiri. Maksudnya, penyelenggaraan perpustakaan, dengan maksud dan tujuan untuk melayani

masyarakat. Namun, sebaliknya masyarakat mungkin saja belum mengetahui, memahami, dan menyadari apa arti dan kegunaan perpustakaan (Sutarno, 2006).

Sebagai perpustakaan yang melayani kebutuhan informasi untuk masyarakat umum, perpustakaan belum digunakan secara optimal. Hal ini terbukti bahwa pengunjung perpustakaan belum sebanyak seperti yang diharapkan dan belum mewakili semua umur dan golongan (Widodo, 1991). Perpustakaan umum lebih banyak digunakan oleh kelompok pelajar. Menurut Ratna Udaya Widodo (1991), kehadiran perpustakaan sebagai pusat sumber informasi belum menjadi kebutuhan yang dirasakan masyarakat luas. Perpustakaan hanya dimanfaatkan oleh sebagian kecil masyarakat. Kelompok masyarakat yang telah merasakan dan mengetahui manfaat perpustakaan umum adalah mereka yang berpendidikan tinggi, walaupun tidak semuanya. Konsep yang ada pada masyarakat sekarang ini adalah perpustakaan bukanlah sebuah lembaga milik atau untuk umum, tetapi hanya untuk orang-orang tertentu. Banyak orang yang menganggap bahwa perpustakaan lebih banyak dikunjungi oleh mereka yang merasa butuh ilmu pengetahuan terutama pelajar dan mahasiswa serta dosen atau peneliti (Rusmana, 1996).

### **2.2.2 Analisis Kekuatan, Kelemahan, Kesempatan, dan Tantangan Perpustakaan**

Salah satu pengkajian atas performa dan kinerja perpustakaan dapat dilakukan dengan analisis SWOT. Hasil analisis tersebut kemudian dijadikan landasan dan pertimbangan untuk mempersiapkan, menata, dan melakukan tindakan yang lebih tepat, sehingga penyelenggaraan perpustakaan dapat memenuhi keinginan dan permintaan pemakai (Sutarno N. S., 2006).

Untuk mengkaji dan menguji eksistensi atas keberadaan suatu organisasi, apakah perlu tetap ada, semakin berkembang, atau makin diperkecil, dan bahkan dihilangkan sama sekali karena dinilai sudah tidak dibutuhkan lagi, dapat dianalisis dengan berbagai cara. Salah satu cara adalah dengan menggunakan analisis “SWOT” atau “Swot analysis”. Analisis tersebut meliputi (1) adanya kekuatan (*strengthen*), (2) kelemahan (*weakness*), (3) kesempatan atau peluang (*opportunity*), dan (4) adanya tantangan atau ancaman (*threats*).

## 2.3 Pengembangan Perpustakaan

Untuk memajukan dan membina perpustakaan, Kepala Desa/lurah harus selalu mengadakan koordinasi dengan pengurus perpustakaan desa/kelurahan (Mudjito, 1992).

Perpustakaan umum didirikan untuk kepentingan masyarakat, maka pemrakarsa, pelopor dalam menyatakan ide pembangunan, pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatannya menjadi tanggung jawab masyarakat dan pemerintah daerah setempat. Proses selanjutnya maju atau mundurnya perpustakaan umum tergantung kepada mereka yang terlibat (*stakeholders*), yaitu seluruh komunitas yang bersangkutan yaitu pemerintah daerah, masyarakat, dan tokoh/pemuka masyarakat. Jadi, pemerintah daerah dapat berfungsi sebagai fasilitator, atau dengan kata lain, sebaiknya keinginan masyarakat dan kemauan pemerintah dipadukan agar efektif (Sutarno N. S., 2006).

### 2.3.1 Kerja Sama dengan Lembaga Lain

Dorothy Sinclair (1979), dalam bukunya *Administration of The Small Public Library*, menjelaskan bahwa permasalahan pada perpustakaan umum kecil harus dihadapi dengan beberapa pendekatan. Untuk memberdayakan koleksi yang dimilikinya, pengelola perpustakaan harus bekerja sama dengan para guru dan petugas sekolah dalam rangka membantu para siswa, namun ia tidak diizinkan untuk hanya fokus pada pelayanan terhadap siswa apalagi sampai menurunkan layanan terhadap orang dewasa.

Staf perpustakaan umum pada suatu komunitas kecil memiliki keuntungan yang tidak dirasakan oleh mereka yang bekerja di wilayah perkotaan yang lebih luas. Pada komunitas yang lebih kecil, pengelola perpustakaan umum dan pengelola perpustakaan sekolah dapat mengenal satu sama lain antara para guru dan pengelola. Saling mengenal dapat membantu dalam mengembangkan kerja sama dalam beberapa aspek, antara lain:

- (1) Mengajarkan cara menggunakan perpustakaan, katalog, dan panduan pembaca.



- (2) Menyelenggarakan kunjungan kelas ke perpustakaan umum dan apabila memungkinkan pengelola perpustakaan berkunjung ke kelas sekolah.
- (3) Menyepakati besarnya bantuan yang sebaiknya siswa terima dari pengelola perpustakaan umum dan pengelola perpustakaan sekolah.
- (4) Menanyakan sebelum tugas diberikan. Apakah bahan literturnya tersedia?

Selain itu, Sutarno (2008) menjelaskan bahwa sebagai lembaga layanan publik, perpustakaan desa/kelurahan tidak dapat bekerja sendiri tanpa bantuan atau kerja sama dengan pihak lain. Oleh karena itu, pengelola perpustakaan desa/kelurahan harus dapat menjalin kerja sama yang baik dengan unit kerja atau instansi di sekitarnya. Organisasi atau lembaga yang dapat diajak bekerja sama antara lain penerbit (IKAPI), toko buku terutama yang tergabung dalam Gabungan Toko Buku Indonesia (Gatbi), agen, distributor, dan penyedia sumber-sumber informasi dan koleksi bahan pustaka, pemerintah dan swasta, khususnya yang bidang kegiatannya sama/hampir sama, yaitu bidang informasi, pendidikan, penelitian, dan pengembangan budaya, masyarakat pemakai perpustakaan, sekolah, dan kelompok-kelompok tertentu lainnya. Suatu kerja sama yang saling menguntungkan (simbiosis mutualisme). Kerja sama diawali dengan suatu kesepakatan tentang bidang atas unsur yang akan dilakukan bersama sebab tidak semua aspek dapat dikerjasamakan dengan pihak lain. Kerja sama yang dikembangkan meliputi berbagai aspek untuk menuju peningkatan daya tarik, citra, dan kinerja perpustakaan.

Beberapa unit kerja atau institusi yang dapat diajak bekerja sama antara lain lembaga pendidikan (sekolah-sekolah, sekolah agama, kursus, pelatihan keterampilan), perpustakaan yang lain di sekitarnya, penerbit dan penyedia buku-buku dan bahan pustaka, instansi layanan umum kelurahan, dan masyarakat. Kerja sama itu antara lain:

- (1) Promosi, sosialisasi, dan publikasi, agar semua penduduk di desa/kelurahan itu mengetahui adanya perpustakaan. Masyarakat menjadi mengerti dan tertarik untuk berkunjung serta memanfaatkannya secara optimal.
- (2) Perluasan jangkauan layanan yang meluas dan merata ke semua wilayah desa/kelurahan tersebut.

- (3) Pengadaan dan pengembangan koleksi, penyandang dana, perhatian dan kepedulian masyarakat terhadap kondisi perpustakaan desa/kelurahan, misalnya dengan wakaf buku.
- (4) Pengembangan ide melalui diskusi, dialog, dan tukar pendapat bagi warga masyarakat sekaligus memotivasi mereka untuk berkunjung ke perpustakaan karena mereka ikut memiliki.
- (5) Partisipasi masyarakat dalam promosi dan pemanfaatan perpustakaan dengan berbagai kegiatan yang melibatkan banyak pihak.
- (6) Kerja sama melakukan semacam penelitian atas respons, tanggapan, dan partisipasi masyarakat terhadap kegiatan perpustakaan.
- (7) Pengolahan bahan pustaka, penyusunan katalog induk, dan layanan, dilakukan dengan perpustakaan umum agar perpustakaan lebih berdaya guna dan tersosialisasikan.

### **2.3.2 Pembinaan SDM**

Anne Gervasi (1988) dalam bukunya yang berjudul *Handbook for Small, Rural, and Emerging Public Libraries* menjelaskan bahwa perpustakaan sekecil apa pun sebaiknya memiliki setidaknya satu orang karyawan yang digaji sebagai pengelola perpustakaan. Orang ini bisa orang yang memiliki latar belakang ilmu perpustakaan atau pun orang yang tidak memiliki latar belakang ilmu perpustakaan. Orang yang ahli tentunya akan sangat dibutuhkan dalam awal pengembangan perpustakaan. Namun, apabila anggaran yang ada tidak memungkinkan untuk menggaji seorang yang ahli, maka menggaji orang yang tidak ahli pun harus dipertimbangkan.

Terdapat beberapa keuntungan mempekerjakan pengelola perpustakaan yang digaji. Pertama, menggaji seorang pengelola secara otomatis akan menimbulkan rasa tanggung jawab untuk mengembangkan perpustakaan. Selain itu penggajian terhadap pengelola memberikan kejelasan tanggung jawab sehingga akan tercipta pengelolaan yang lancar dan hubungan kerja yang stabil.

Untuk membantu pekerjaan karyawan yang digaji, maka perlu juga adanya seorang karyawan sukarela. Orang ini perlu diberikan pelatihan sebagai dasar pengetahuannya tentang pengelolaan perpustakaan.